

KEB  
PB-137  
Sya  
S

# STRATEGI PERBANKAN MENGHADAPI ERA KRISIS MULTIDIMENSI



## Pidato Pengukuhan

Diucapkan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar  
dalam mata kuliah Ilmu Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga  
di Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2002

Yang terhormat,

Saudara Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga

Saudara Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Airlangga

Saudara-saudara dekan dan Pembantu Dekan Fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Airlangga

Saudara-saudara Guru Besar Universitas Airlangga

Rekan-rekan sejawat dan Civitas Akademika Universitas Airlangga

Dan para undangan yang saya muliakan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Terlebih dulu, perkenankanlah saya pada kesempatan yang membahagiakan ini memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di Aula ini dalam keadaan sehat walafiat, untuk menyaksikan Upacara Pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan.*

Perkenankanlah sekarang saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul;

## **STRATEGI PERBANKAN MENGHADAPI ERA KRISIS MULTIDIMENSI**

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

## 1. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang aktifitas utamanya adalah perantara/*intermediary* di bidang keuangan. Perbankan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat pemilik dana untuk disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan dana. Perbankan akan tumbuh dan berkembang bila kedua sisi masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang juga. Ketimpangan yang terjadi pada kedua sisi masyarakat tersebut akan mengakibatkan terganggunya kehidupan perbankan dan perekonomian.

Dari sisi perekonomian baik di negara-negara sedang berkembang maupun di negara-negara maju, perbankan merupakan jantungnya perekonomian. Terganggunya (sakitnya) perbankan akan mengakibatkan terganggunya (sakitnya) perekonomian, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejak 1998 / 1999 perekonomian Indonesia mengalami krisis, hal ini disebabkan karena sejak pertengahan 1997 perbankan Indonesia mulai sakit. Sampai saat ini, kondisi perbankan dan perekonomian di Indonesia dalam keadaan sakit.

Hadirin yang saya muliakan,

## 2. KONDISI PERBANKAN SEBELUM KRISIS DAN SAAT KRISIS

Sejak digulirkan deregulasi perbankan 27 oktober 1988 (Pakto 1988), perbankan di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pertumbuhan dan perkembangan ini dapat dilihat

dari pertambahan jumlah bank dan kantor bank serta jumlah dana yang dikumpulkan dan yang disalurkan dalam bentuk kredit.

**Tabel 1**  
**SIMPANAN MASYARAKAT DAN KREDIT BANK UMUM**  
**TAHUN 1993 s/d Juli 1997 (dalam Rp dan \$)**

TAHUN	SIMPANAN (milyar Rp)	KREDIT (milyar Rp)
1993	142.679	150.271
1994	170.406	188.880
1995	214.764	234.611
1996	281.718	292.921
1997	318.004	340.028

Sumber : Bank Indonesia

Dari tabel 1, selama 9 semester (empat setengah tahun) sebelum krisis dapat dilihat, dana masyarakat yang dihimpun perbankan (Bank Umum) dalam 4,5 tahun rata-rata bertambah Rp. 38.527 milyar (27%) per tahun. Kredit yang disalurkan baik dalam rupiah maupun valuta asing selama 4,5 tahun rata-rata bertambah Rp. 42.168 milyar (28%) per tahun.

Dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan jumlah dana yang dihimpun bank umum masih dalam kondisi yang positif dalam menunjang perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingkat *loan to deposit*. *Loan to deposit ratio* (LDR) sebagai berikut:

1. Pada tahun 1993 simpanan masyarakat Rp. 142.679 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 150.271 milyar (LDR = 105,3%).
2. Pada tahun 1994 simpanan masyarakat Rp. 170.406 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 188.880 milyar (LDR = 110,8%).



3. Pada tahun 1995 simpanan masyarakat Rp. 214.764 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 234.611 milyar (LDR = 109,2%).
4. Pada tahun 1996 simpanan masyarakat Rp. 281.718 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 292.921 milyar (LDR = 104%).
5. Pada tahun 1997 (bulan Juli) simpanan masyarakat Rp. 268.599 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 340.028 milyar (LDR = 107,6%).

Berdasarkan LDR selama 4,5 tahun, perbankan Indonesia (bank umum) dalam melakukan operasional perkreditan pasif dan aktifnya menunjukkan kondisi ideal.

Hadirin yang terhormat,

Permasalahan yang terjadi pada saat itu dalam melaksanakan fungsinya (Bank Umum) sebagai *financial intermediary* tidak sebagaimana ketentuan pemerintah (BI). Bank Indonesia memberikan ketentuan komposisi besaran kredit untuk pemilik bank dan group usahanya yaitu batas maksimal pemberian kredit (BMPK) atau legal lending limit (3L) adalah 30%, sedang untuk masyarakat lainnya seharusnya minimal 70% dari total kredit. Pada kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, kredit bank umum swasta nasional umumnya melanggar batas maksimum BMPK tersebut.

Pelanggaran terhadap BMPK ini sebagaimana yang dilakukan oleh 16 bank umum swasta nasional yang pada 1 November 1997

dicabut ijin usahanya dengan BMPK antara 70% samapai dengan 98%.

Dari pelanggaran BMPK oleh kebanyakan bank umum swasta nasional ini mengakibatkan manfaat berupa keuntungan usaha hanya dinikmati sekelompok pengusaha besar (para konglomerat). Hal inilah yang mengakibatkan lebih besarnya kesenjangan antara pengusaha besar dan kecil. Sebagai ilustrasi, kredit untuk para usaha kecil yang telah disalurkan bank umum swasta nasional rata-rata selama 4,5 tahun hanya 16,38%, sedangkan ketentuan Bank Indonesia minimal 20% dari total kredit untuk Usaha Kecil (UK).

Bulan Agustus 1997 perbankan Indonesia mulai terkena dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Nilai tukar rupiah pada bulan Juli 1997 berada pada kisaran Rp. 2599 per US\$ 1.00, pada bulan Agustus nilai tukar rupiah terhadap US\$ menjadi Rp. 3035 per US\$ 1.00 atau rupiah terdepresiasi  $\pm 17\%$  terhadap US\$. Penurunan nilai tukar rupiah terutama terhadap US\$ bagaikan kuda banal yang tidak terkendalikan lagi sejak pemerintah melepas sistem kurs mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*) menjadi system kurs mengambang bebas (*full floating exchange rate*).

Kondisi ini memperburuk perbankan di Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary*, sebagaimana tertera pada tabel 2 & 3.

**Tabel 2**  
**SIMPANAN MASYARAKAT DAN KREDIT PADA BANK**  
**UMUM PERSERO DAN BANK UMUM DAERAH**  
**(Agustus 1997 – 2001, dalam milyar rupiah)**

TAHUN	BANK PERSERO		BANK DAERAH	
	SIMPANAN	KREDIT	SIMPANAN	KREDIT
1997	133.042	153.266	8.796	7.539
1998	271.554	220.747	10.932	6.570
1999	286.427	112.288	14.017	6.793
2000	328.457	102.061	19.896	10.106
2001	366.028	117.104	37.008	15.419

Sumber : Bank Indonesia

Pada tabel 2 terlihat jumlah simpanan masyarakat pada Bank Persero dari bulan Agustus 1997 sampai dengan tahun 2001 (4,5 tahun) selalu mengalami kenaikan rata-rata Rp. 51.775 milyar (55%) per tahun. Di sisi lain kredit kredit yang disalurkan selalu mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir rata-rata Rp. 25.910 milyar (13,3%).

Kenaikan simpanan masyarakat yang dihimpun Bank Umum Persero pada periode ini ternyata tidak ditindaklanjuti dalam penyaluran kreditnya kemasyarakatan. Hal ni terlihat pada tingkat LDR:

1. Pada tahun 1997 (5 bulan), simpanan masyarakat Rp. 133.042 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 153.266 milyar (LDR=115,2%).



2. Pada tahun 1998, simpanan masyarakat Rp. 271.554 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 220.747 milyar (LDR=81,3%).
3. Pada tahun 1999, simpanan masyarakat Rp. 286.427 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 112.288 milyar (LDR=39,2%).
4. Pada tahun 2000, simpanan masyarakat Rp. 328.457 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 102.061 milyar (LDR=31,1%).
5. Pada tahun 2001, simpanan masyarakat Rp. 366.028 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 117.104 milyar (LDR=31,9%).

Kenaikan simpanan masyarakat yang dihimpun Bank Umum Pemerintah daerah ternyata tidak ditindaklanjuti dalam penyaluran kreditnya. Hal ini terlihat pada tingkat *loan to deposit ratio*-nya (LDR):

1. Pada tahun 1997 (5 bulan), simpanan masyarakat Rp. 8.796 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 7.539 milyar (LDR=85,7%).
2. Pada tahun 1998, simpanan masyarakat Rp. 10.932 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 6.750 milyar (LDR=61,7%).
3. Pada tahun 1999, simpanan masyarakat Rp. 14.017 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 6.793 milyar (LDR=48,4%).
4. Pada tahun 2000, simpanan masyarakat Rp. 19.896 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 10.106 milyar (LDR=50,8%).
5. Pada tahun 2001, simpanan masyarakat Rp. 37.008 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 15.419 milyar (LDR=41,7%).



**Tabel 3**  
**SIMPANAN MASYARAKAT DAN KREDIT PADA**  
**BANK UMUM SWASTA NASIONAL DAN**  
**BANK UMUM SWASTA ASING / CAMPURAN**  
**(Agustus 1997 – 2001, dalam milyar rupiah)**

TAHUN	BUSN		BUSA / CAMPURAN	
	SIMPANAN	KREDIT	SIMPANAN	KREDIT
1997	177.193	168.723	38.582	48.606
1998	235.605	193.361	55.433	66.748
1999	252.880	56.012	2.294	50.040
2000	279.037	82.425	92.989	74.408
2001	305.451	101.872	97.259	73.199

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 3, terlihat penghimpunan dana melalui simpanan masyarakat yang dilakukan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) menunjukkan kenaikan rata-rata per tahun Rp. 28.501 milyar (16,1%). Tetapi kenaikan simpanan masyarakat oleh Bank Umum Swasta Nasional tidak direspon positif melalui kenaikan perannya dalam menyalurkan kredit. Hal ini tampak dari semakin kecil/rendahnya tingkat LDR:

1. Pada tahun 1997 (5 bulan), simpanan masyarakat Rp. 177.193 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 168.723 milyar (LDR=95,22%).
2. Pada tahun 1998, simpanan masyarakat Rp. 235.605 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 193.361 milyar (LDR=82,07%).

3. Pada tahun 1999, simpanan masyarakat Rp. 252.880 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 56.012 milyar (LDR=22,15%).
4. Pada tahun 2000, simpanan masyarakat Rp. 279.037 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 82.425 milyar (LDR=29,54%).
5. Pada tahun 2001, simpanan masyarakat Rp. 305.451 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 101.872 milyar (LDR=33,35%).

Satu-satunya perbankan di Indonesia yang masih konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *financial intermediary* adalah Bank Umum Swasta Asing dan Campuran. Hal ini dapat dilihat dari tingkat LDR yang masih dalam batas relatif normal:

1. Pada tahun 1997 (5 bulan), simpanan masyarakat Rp. 38.582 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 48.606 milyar (LDR=125,98%).
2. Pada tahun 1998, simpanan masyarakat Rp. 55.433 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 66.748 milyar (LDR=120,41%).
3. Pada tahun 1999, simpanan masyarakat Rp. 72.294 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 50.040 milyar (LDR=69,22%).
4. Pada tahun 2000, simpanan masyarakat Rp. 92.989 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 74.408 milyar (LDR=80%).
5. Pada tahun 2001, simpanan masyarakat Rp. 97.259 milyar, kredit yang disalurkan Rp. 73.199 milyar (LDR=75,26%).

Berdasarkan uraian sebelumnya, kecuali Bank Umum Swasta Asing dan Campuran, sejak tahun 1999 sampai sekarang penyaluran kredit kemasyarakatan sangat rendah.

Pertanyaan yang timbul, permasalahan apa yang dialami Bank Umum tersebut dan dikemanakan kelebihan dana masyarakat?

Permasalahan yang dihadapi Bank Umum di Indonesia antara lain:

1. Tingginya tingkat *non performing loan* (NPL) yang diakibatkan besarnya jumlah kredit macet. Tingginya NPL ini terutama disebabkan macetnya kredit dalam valuta asing (akibat kenaikan kurs valuta asing). Kurs US\$ tahun 1996 / 1997 = Rp. 2.419,-, tahun 1997 / 1998 = Rp. 8.325,-, tahun 1998 / 1999 = Rp. 8.685,-, tahun 1999 / 2000 = Rp. 7.590,- dan tahun 2000 / 2001 = Rp. 10.400,-.
2. Tingginya tingkat suku bunga simpanan berjangka dibandingkan tingkat suku bunga kredit, sehingga Bank Umum beroperasi dengan *negative spread*. Tahun 1996 / 1997 bunga simpanan berjangka 16,67% dan bunga kredit 17,67%. Pada tahun 1997 / 1998 bunga simpanan berjangka 28,15% dan bunga kredit 22,16%. Pada tahun 1998 / 1999 bunga simpanan berjangka 49,14% dan bunga kredit 23,10%. Pada tahun 1999 / 2000 bunga simpanan berjangka 17,42% dan bunga kredit 20,32%. Pada tahun 2000 / 2001 bunga simpanan berjangka 11,71% dan bunga kredit 18%.
3. Di sektor usaha (riil) kegiatan investasi dan produksi sangat terbatas karena masih tingginya risiko dan ketidakpastian usaha.
4. Bank umum masih berkonsentrasi pada perbaikan peringkat CAR-nya.



Akibat dari permasalahan tersebut diatas, Bank Umum kuatir untuk menyalurkan kredit yang berisiko tinggi. Maka untuk menghindari dari permasalahan-permasalahan tersebut, Bank Umum lebih banyak menempatkan kelebihan dananya pada pinjaman antar bank (*inter bank call money*) dengan jangka waktu yang sangat pendek, selain itu Bank Umum banyak menempatkan dananya dalam bentuk obligasi dan SBI yang risikonya nol.

Hadirin yang terhormat,

### 3. STRATEGI PERBANKAN DALAM MASA KRISIS

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa perbankan sebagai jantungnya perekonomian. Bila perbankan kurang berperan dalam melaksanakan fungsinya sebagai *financial intermediary* maka yang akan menerima langsung adalah sector usaha (riil). Akibat berikutnya bertambah banyak sector usaha yang mengurangi/menghentikan usahanya, sehingga menunjukkan jumlah pengangguran dan semakin menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk sector usaha. Bila peran perbankan masih tetap sebagaimana saat ini, maka sangat dapat dipastikan krisis multidimensi yang melanda perekonomian Indonesia tidak akan pernah teratasi.

Perbankan, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besar/kecilnya keuntungan yang diperoleh, tetapi perbankan punya tugas menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian. Hal ini sesuai dengan peran perbankan sebagai *agent of development*.



Strategi perbankan yang seharusnya dilakukan tahun 2002 dan seterusnya agar perekonomian Indonesia keluar dari krisis, yaitu:

1. Bank dalam penyaluran kreditnya lebih ditujukan pada usaha kecil dan menengah, terutama usaha-usaha yang tidak banyak tergantung pada penggunaan bahan baku impor. Karena selain ketergantungan pada pihak luar negeri juga akibat dari ketidakpastian kurs valuta asing (valas).

Dalam penyaluran kredit UKM, bank harus memprioritaskan sector-sektor usaha yang sepenuhnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga akan lebih menumbuhkan usaha-usaha hulu (*backward linkage*). Tumbuhnya UKM akan sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran, karena penyerapan tenaga kerja UKM banyak jumlahnya, terutama untuk tenaga *unskill* daripada kredit pada usaha-usaha besar. Sedangkan kredit untuk usaha-usaha besar dalam jangka pendek dikurangi, karena usaha-usaha besar masih mungkin untuk memperoleh dana dari lembaga keuangan lainnya seperti melalui bursa efek, investor luar negeri dan lain-lain.

2. Bank harus membatasi pemberian kredit dalam bentuk valas selama kondisi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing masih sangat labil. Karena salah satu penyebab utama kredit macet pada masa krisis adalah pada debitur bank harus membeli valas untuk melunasi kreditnya dengan kurs 400% sedang 500% dari kurs pada saat ia memperoleh kredit.
3. Kredit pada usaha-usaha besar harus diutamakan pada produk-produk ekspor dengan muatan bahan baku impor yang kecil.

Sehingga fluktuasi kurs valas tidak begitu besar pengaruhnya terhadap aktivitas usahanya dan kredit macet dapat diminimalisir.

4. Kredit konsumtif dalam satu dua tahun kedepan (2002, 2003) perlu ditingkatkan. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada produk-produk yang dihasilkan UKM. Sehingga adanya dukungan kepastian usaha dan pendorong pengembangan UKM.
5. Untuk memotivasi para debitur agar tertib dan tepat waktu dalam melunasi kreditnya, bank perlu memberikan insentive. Bank selama ini hanya memberikan hadiah-hadiah yang menarik hanya pada para penyimpan (operasional perkreditan pasif). Belajar dari pengalaman masa lalu (banyaknya jumlah kredit bermasalah/macet), maka bank perlu untuk memberikan hadiah-hadiah yang menarik bagi para debitur yang tertib dan tepat waktu dalam pelunasan kreditnya (operasional perkreditan aktif).
6. Selama nilai tukar rupiah terhadap valas masih sangat labil, maka bank harus menghindari penumpukan *current assets* dalam bentuk valas agar terhindar dari kerugian, akibat menguatnya nilai tukar rupiah terhadap valas.  
Sebagai ilustrasi pada bulan Desember 2001 kurs US\$ berada pada kisaran Rp. 10.400,- - Rp. 10.500,- dan empat bulan kemudian (April) kurs beradapada kisaran Rp. 9.300,- - Rp. 9.400,-. Berarti dalam empat bulan bank akan rugi Rp. 1.100,- per US\$ 1 dan asset bank juga akan berkurang sebesar kerugian tersebut.

7. Sejalan dengan pelaksanaan Otoda, maka bank harus merubah kebijakan operasionalnya dari sentralisasi ke desentralisasi. Kebijakan ini diberlakukan desentralisasi baik dalam kaitannya dengan penghimpunan dana masyarakat (operasional perkreditan pasif) maupun dalam hal penyaluran kreditnya (operasional perkreditan aktif). Sehingga menambah keleluasaan bank cabang untuk menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian regional.

Selain hal tersebut, bank-bank harus melaksanakan peningkatan status bank-bank cabang (Dati II) dari bank non devisa menjadi bank devisa. Hal ini untuk mengantisipasi pelaksanaan perdagangan internasional (ekspor-impor) yang langsung dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di daerah dan pelaksanaan investasi langsung (PMA) maupun pinjaman luar negeri.

8. Bagi Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat dan secara bertahap harus menurunkan bunga SBI samapi pada kisaran 8%-9%. Sampai saat ini dengan masih relatif tingginya bunga SBI, bank-bank sakit untuk menyalurkan kreditnya pada sector riil, sehingga bank lebih aman dan mendapat kepastian spread bunga positif dengan menempatkan dananya berupa SBI.

Penurunan bunga SBI harus diinformasikan terlebih dulu pada bank-bank sehingga bank-bank mempunyai persiapan dalam pengalihan dari SBI ke dalam bentuk kredit sector riil.

BI harus merubah *policy* konvensionalnya bahwa untuk memulihkan stabilitas nilai rupiah tidak hanya melakukan kontraktif terhadap jumlah uang yang beredar. Melalui pertumbuhan dan perkembangan sector riil (melalui kredit



bank) maka keseimbangan antara sector moneter dengan sector riil dapat dipelihara dalam kaitannya dengan penciptaan stabilitas nilai rupiah.

9. Bank Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank, serta menindak tegas (memberi sanksi) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bank-bank. Penilaian terhadap manajemen bank ditekan pada tersedianya SDM yang tepat (*fit and proper test*).
10. Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan yang independen (UU No.23 tahun 1999) harus merubah dasar perhitungan inflasi. Sampai saat ini masih didasarkan pada perubahan perubahan harga 249-353 komoditas yang dikelompokkan dalam tujuh kelompok. Untuk lebih mendekati realitanya maka perubahan harga komoditas harus dikembangkan 7sampai dengan 1000 komoditas.  
Hal ini akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dalam kaitannya dengan stabilitas nilai tukar eksternal rupiah (kurs valas), hendaknya BI secara bertahap mengembalikan system kurs berdasarkan system kurs mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*).

#### 4. KESIMPULAN

Perbankan di Indonesia tumbuh dan berkembang pesat sejak digulirkannya deregulasi bidang perbankan 27 Oktober 1988. Banyak para pengusaha-pengusaha besar yang melakukan deversifikasi usaha ke bidang perbankan dan tidak sedikit para pengusaha bank yang tidak mengerti tentang apa fungsi dan peran



dari bank. Hal ini mengakibatkan kebanyakan dari pemilik Bank Umum Swasta Nasional yang memanfaatkan bank miliknya untuk menghidupi usaha pokoknya (usahanya di luar bank).

Para pemilik bank menggunakan sebagian besar simpanan masyarakat untuk kepentingan sendiri. Sebagai contoh kasus BHS Bank, Bank Umum Nasional (BUN), Bank dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan lain-lain. Sehingga salah satu penyebab terjadinya krisis perbankan karena dalam operasionalnya bank-bank melenceng dari yang seharusnya sebagai *financial intermediary* dan sebagai *agent of development*.

Pada masa krisis yang melanda Indonesia sampai saat ini, bank-bank (kecuali bank-bank asing dan campuran) lari dari tanggung jawab moralnya untuk berperan dalam mengatasi krisis. Bank-bank hanya memikirkan memperoleh keuntungan yang maksimal melalui penempatan dana pada *inter bank call money*, obligasi dan SBI. Krisis secara bertahap akan teratasi bilamana bank-bank (sebagai jantungnya perekonomian) melaksanakan dengan baik fungsi intermediasinya di bidang keuangan.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada bagian akhir pidato pengukuhan ini perkenankanlah sekali lagi saya memanjatkan puji syukur kehadapan Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya kepadakita semua.

Saya menyaari, keberhasilan saya meraih jenjang karir akademik samapi tingkat sekarang ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa bantuan, dorongan dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, patutlah saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak.

Kepada Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Kepada Rektor Prof. Dr. Med. Puruhito, dr, beserta para Pembantu Rektor dan para anggota Senat Universitas Airlangga yang telah berkenan menerima kehadiran saya serta mempercayai untuk memangku jabatan Guru Besar, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Kepada Dekan Drs. Ec. H. Karyadi Mintaroeim, MS beserta para Pembantu Dekan dan anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga sebagai instansi pertama yang mengusulkan saya dalam jabatan Guru Besar, saya ucapkan terima kasih.

Kepada saudara-saudara Ketua Jurusan, Sekretaris, rekan-rekan Dosen, karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga atas kerjasama dan doa restunya kepada diri saya, terimalah jabatan sebagai ungkapan terima kasih saya.

Kepada Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr, beserta staf, karyawan dan mahasiswa, terima kasih atas kerjasama dan doa restunya kepada saya.

Kepada Ketua IKOMA Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Ir. H. Soeratman, beserta anggota pengurus, atas segala bantuannya dalam pelaksanaan acara pengukuhan ini, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih.

Kepada Almarhum Prof. H. Miendrowo Prawirodjoemeno, SE, sebagai Promotor, Dr. I.B.M. Santika, SE dan Dr. H. Bambang Tri Cahyono, MA, SE, selaku Co-promotor dalam pendidikan program S3, dengan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Prof. Dr. H. Soeroso Imam Zadjuli, SE dan Dr. Soedjono Abipraja, SE, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga atas segala dukungan moril, saya sampaikan terima kasih.

Kepada Soebianto Soengeng, SH, selaku Ketua Panitia beserta seluruh panitia, terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa kerja keras panitia, tak mungkin upacara pengukuhan ini dapat berlangsung dengan baik.

Kepada Prof. Wahjoedi, SH, CN, sebagai guru, kakak sekaligus rekan saya yang tidak bosan-bosannya memberi nasihat kepada saya, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada anggota Paduan Suara Mahasiswa yang telah ikut memeriahkan upacara pengukuhan ini, terimalah uluran rasa terima kasih saya.

Kepada kanda Prof. Abd. Gani, SH, MS, atas dorongan moril yang selalu diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih.

Kepada Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, SE, SU, yang telah memacu saya dalam pengusulan jabatan Guru Besar, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



Kepada kanda Prof. Dr. H. Eka Afnan Troena, SE, atas

~~saya dorongan dan bantuan yang~~ telah diberikan kepada saya,

pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, untuk semua guru-guru sejak saya menimba ilmu di sekolah dasar sampai dengan S3, atas jasa-jasanya tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup. Tanpa mereka, tidak mungkin pada hari ini saya berdiri diatas mimbar yang amat terhormat ini.

Para hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan sembah sujud kepada almarhum Ayahanda R. Abd. Kadir Tjitrohadiwidjojo dan Ibunda Ny. Hj. R. Ayu Mutmainah, yang telah berjasa dalam membesarkan dan mendidik sehingga menjadi insane yang mandiri. Saya panjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga arwah almarhum bapak mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT.

Sembah sujud juga saya sampaikan kepada kedua mertua saya, Bapak H.R. Sirat Harijono beserta Ibu, atas dorongan, nasihat dan doa restu bagi perjalanan hidup saya sekeluarga.

Kepada kakak-kakak dan adik-adik saya, keluarga almarhum H.R. Samioein, BA, keluarga Ir. H. Soeratman, keluarga H.R. Soeipto, SH, almarhumah R. Ayu Chusnul Chotimah, keluarga Choirul Taufik dan keluarga Moch. Sahid Taufik, SH, saya sampaikan pula terima kasih atas keakraban dan kebersamaan



yang telah berlangsung selama ini, semoga hubungan ini dapat berlangsung terus.

Akhirnya secara khusus pada kesempatan ini kepada istri saya tercinta dan tersayang, Dr. Hj. Fatimah Riswati, SE. MS, atas dukungan serta pengertian dan kesabaran yang selalu setia mendampingi saya baik dalam keadaan suka maupun duka, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Selanjutnya kepada anak-anak tersayang, Lely beserta suaminya, Taufik, Wawan beserta istri, Andari, Tita, Kiki dan kedua cucu saya, Nofel dan Nafilah, yang merupakan sumber kasih sayang dalam menempuh kehidupan ini, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala pengertian, perhatian, doa dan pengorbanan yang telah diberikan dalam mewujudkan suasana ketenangan dan keakraban dalam keluarga yang sakinah. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada mereka dan menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala doa restu, bantuan dan perhatiannya.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Jabatan Guru Besar yang saya terima merupakan kehormatan bagi saya dan keluarga, dengan resiko dan tanggung jawab yang semakin besar.

Sebagai akhir dari pidato saya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang datang dengan penuh perhatian dan kesabaran mendengarkan pidato pengukuhan ini sampai selesai.

Wabillahittaufiq Wal Hidsyah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

